



Kebijakan Fiskal Instrumen Efektif Wujudkan Ketahanan Energi Nasional

Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan

Jakarta, 6 Juni 2012





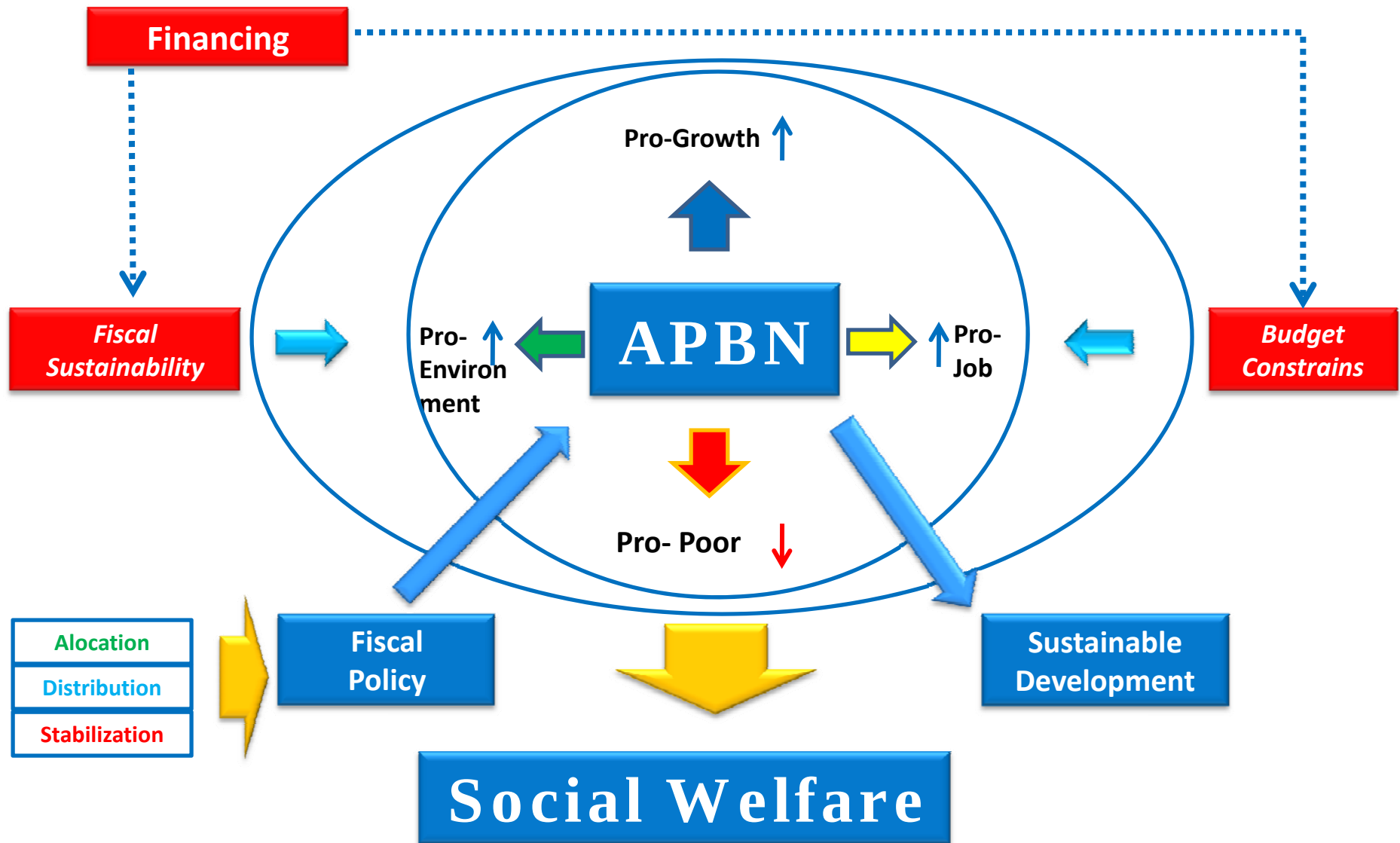
- **Kebijakan Fiskal**
- **Tantangan Mewujudkan Ketahanan Energi**
- **Arah Kebijakan Fiskal untuk Ketahanan Energi**



Kebijakan Fiskal



Strategi kebijakan fiskal untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan melalui 4 pilar (*pro growth, pro job, pro poor & pro environment*)

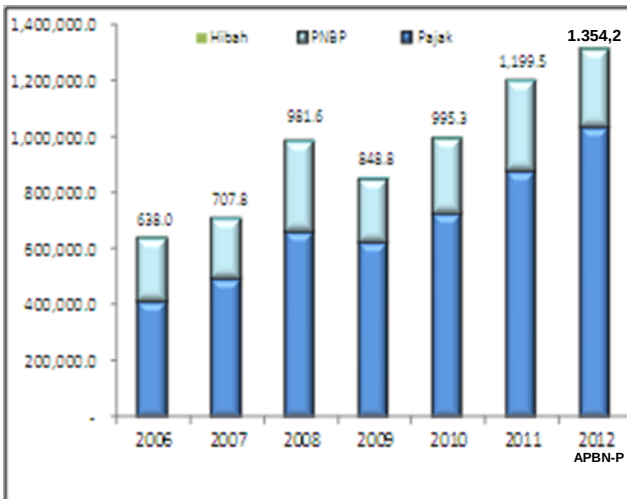




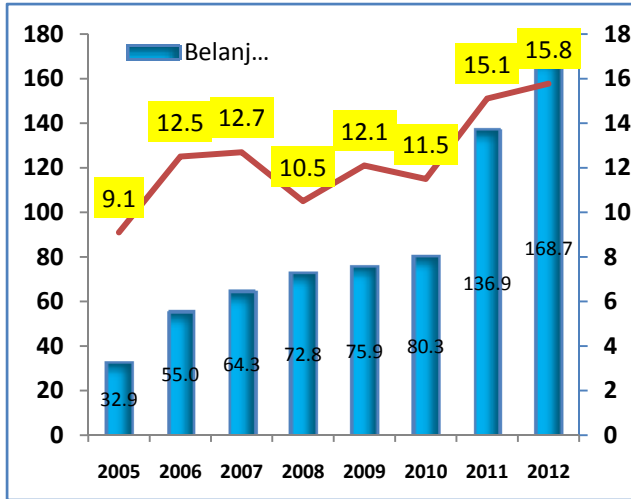
Strategi Penyehatan Fiskal melalui upaya menjaga *Fiscal Sustainability*



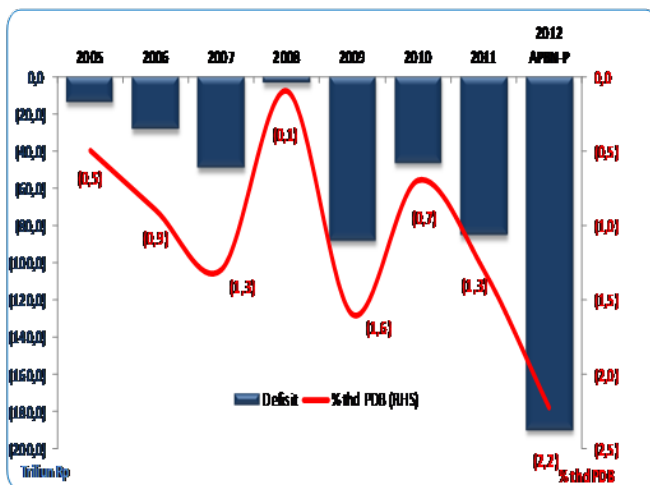
1. Optimalisasi Pendapatan negara



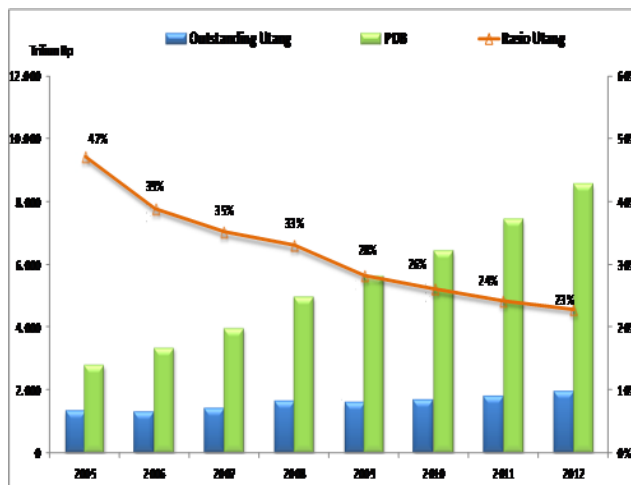
2. Peningkatan *Quality spending* → Belanja modal meningkat



3. Pengendalian defisit dalam batas aman (<3% PDB)



4. Menurunkan rasio utang terhadap PDB.



Arah Kebijakan:

- **Optimalisasi pendapatan** negara dgn mempertimbangkan iklim investasi & dunia usaha untuk menjamin keberlanjutan pendapatan negara;
- Meningkatkan efisiensi & efektifitas belanja negara melalui meningkatkan *quality of spending*. Peningkatan belanja infrastruktur diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan;
- **Mengendalikan defisit** dalam batas aman < 3% PDB;
- **Menurunkan rasio utang terhadap PDB** dan mencari sumber pembiayaan yg rendah resiko.



Ringkasan APBN-P 2012



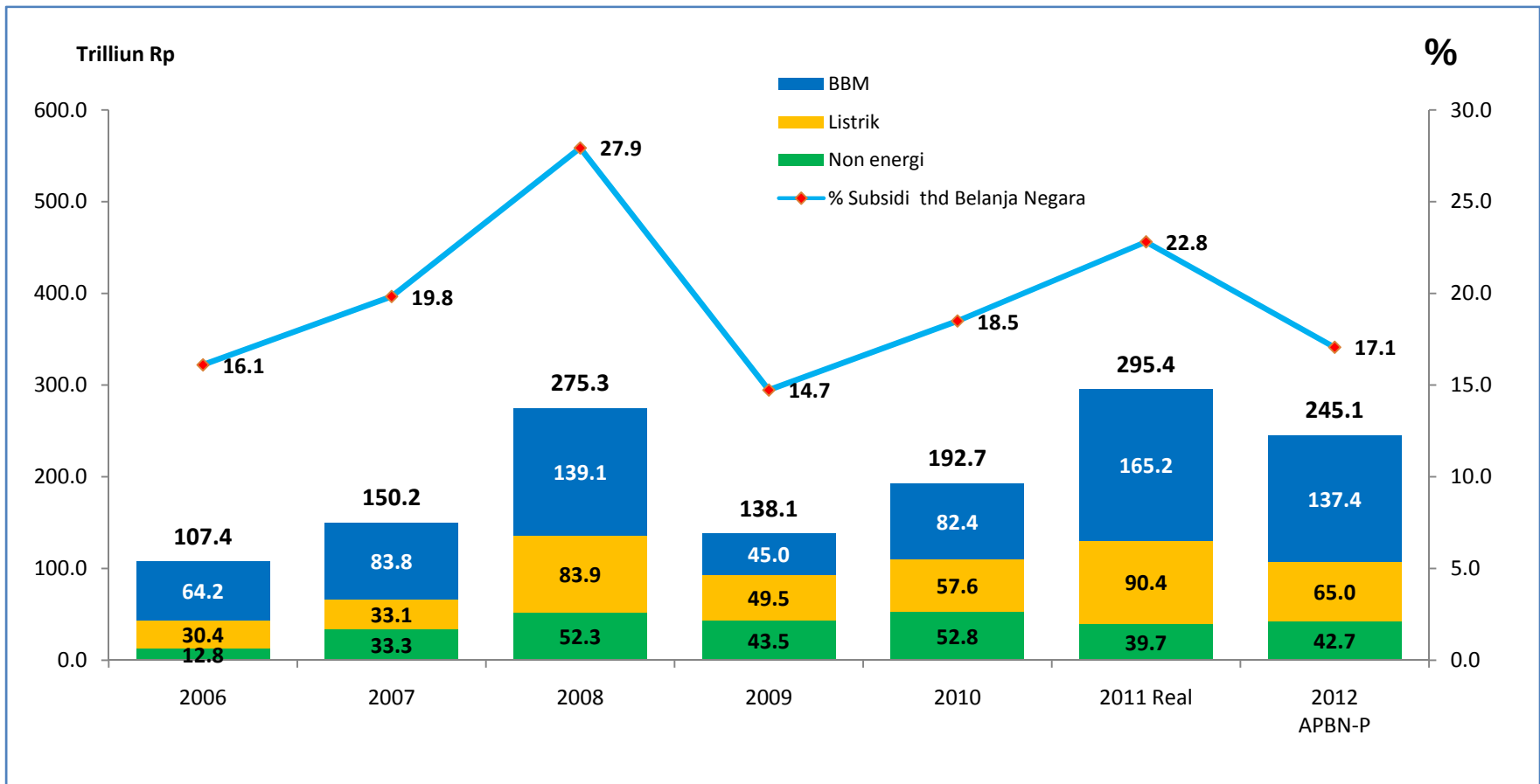
Triliun Rp

Uraian	2011		2012		Selisih thd APBN	
	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Nominal	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1,169.9	1,199.5	1,311.4	1,358.2	46.8	3.6
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,165.3	1,196.9	1,310.6	1,357.4	46.8	3.6
1. Penerimaan Perpajakan	878.7	872.6	1,032.6	1,016.2	(16.3)	(1.6)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	286.6	324.3	278.0	341.1	63.2	22.7
II. Hibah	4.7	2.6	0.8	0.8	-	-
B. Belanja Negara	1,320.8	1,289.6	1,435.4	1,548.3	112.9	7.9
I. Belanja Pemerintah Pusat	908.2	878.3	965.0	1,069.5	104.5	10.8
- Belanja K/L	461.5	402.6	508.4	547.9	39.5	7.8
- Belanja Non K/L	446.8	475.7	456.6	521.6	65.0	14.2
II. Transfer Ke Daerah	412.5	411.4	470.4	478.8	8.4	1.8
C. Keseimbangan Primer	(44.3)	3.1	(1.8)	(72.3)	(70.5)	3,912.4
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(150.8)	(90.1)	(124.0)	(190.1)	(66.1)	53.3
% to GDP	(2.1)	(1.3)	(1.5)	(2.23)	(0.7)	45.8
E. Pembiayaan	150.8	129.3	124.0	190.1	66.1	53.3
I. Pembiayaan Dalam Negeri	153.6	148.5	125.9	194.5	68.6	54.5
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(2.8)	(19.2)	(1.9)	(4.4)	(2.5)	133.9
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	-	39.2	(0.0)	-	-	-

- Kebijakan defisit lebih ekspansif meningkat dari 1,5% → 2,23% PDB;
- Kebijakan yang ekapansif diarahkan (i) menjaga kesinambungan fiskal, (ii) meningkatkan efisiensi ekonomi, (iii) tetap stimulasi perekonomian, (iv) menjaga daya beli, (v) meningkatkan kesejahteraan;
- Untuk menutup defisit dipenuhi terutama dari SAL dan penerbitan SBN.



Tingginya beban subsidi energi dalam APBN perlu dikendalikan untuk menyehatkan fiskal dan mengurangi volume konsumsi yang berlebihan...



- Anggaran subsidi energi dalam APBN semakin besar dan sangat berisiko (pengaruh fluktuatifnya harga minyak bumi) sehingga dapat membebani APBN.
- Salah satu solusinya: mendorong diversifikasi energi alternatif.



KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI



1. Mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi;
2. Melaksanakan program konversi BBM ke BBG;
3. Optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg;
4. Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN)
5. Menurunkan komposisi pemakaian BBM untuk pembangkit listrik
6. Meningkatkan bauran energi panas bumi, air, dan biodiesel, termasuk energi tenaga surya khususnya di daerah-daerah terpencil.



- I. **Reformasi subsidi energi dalam jangka menengah, secara bertahap, a.l melalui :**
 - Pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan dan manajemen distribusi
 - Penyesuaian harga BBM bersubsidi menuju harga keekonomian.
 - Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk kelompok rumah tangga tertentu dan penggunaan harga tertentu.
- II. **Pengalihan dana subsidi, al untuk:**
 - Bantuan Langsung Tunai
 - Pembangunan infrastruktur
 - jalan nasional dan lokal;
 - kereta api (Jalur Jawa utara, lokal, kota termasuk monorel);
 - pelabuhan dan pelabuhan udara (perintis);
 - sistem transportasi perkotaan ;
 - air minum.
 - Bantuan sosial (kesehatan dan lingkungan perkotaan).
 - Pendidikan



Tantangan Ketahanan Energi



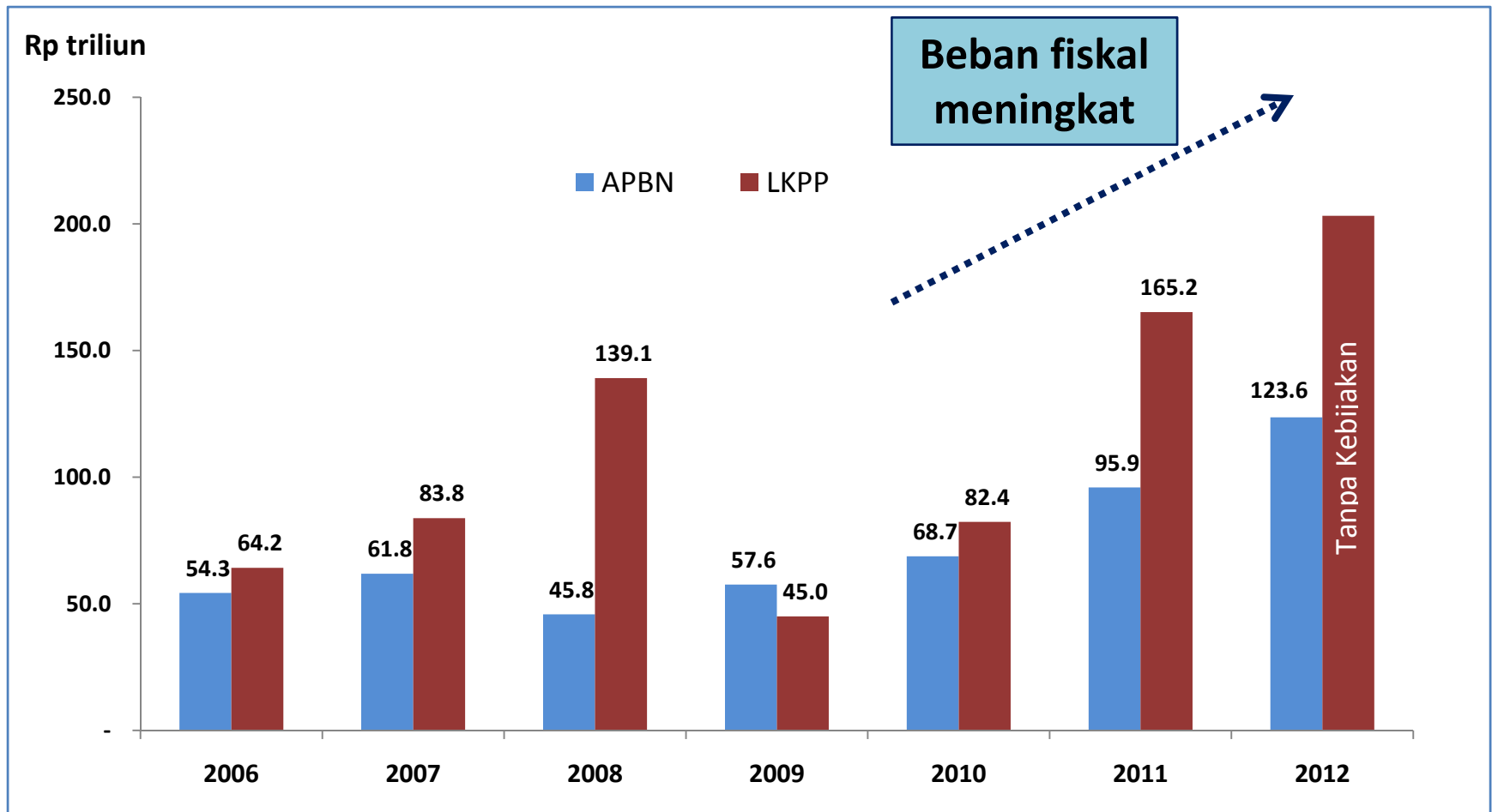
Tantangan Energi di masa mendatang



- Pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan semakin mendesak;
- Kemampuan kapasitas kilang untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri semakin terbatas;
- Peningkatan volume penggunaan energi semakin meningkat signifikan;
- Peningkatan volume konsumsi dipengaruhi harga BBM yang relatif murah, semakin meningkatnya golongan kelas menengah yang mengubah perilaku konsumsi;
- Masih besarnya porsi subsidi energi berpotensi meningkatkan volume konsumsi BBM sehingga mempercepat habis cadangan minyak;
- Penetapan harga gas bumi yang kompetitif serta jaminan ketersediaannya bagi dunia usaha;
- Keberhasilan pelaksanaan program pengaturan konsumsi BBM bersubsidi yang tepat sasaran; dan
- Terpenuhinya bauran energi input pembangkit listrik non BBM.



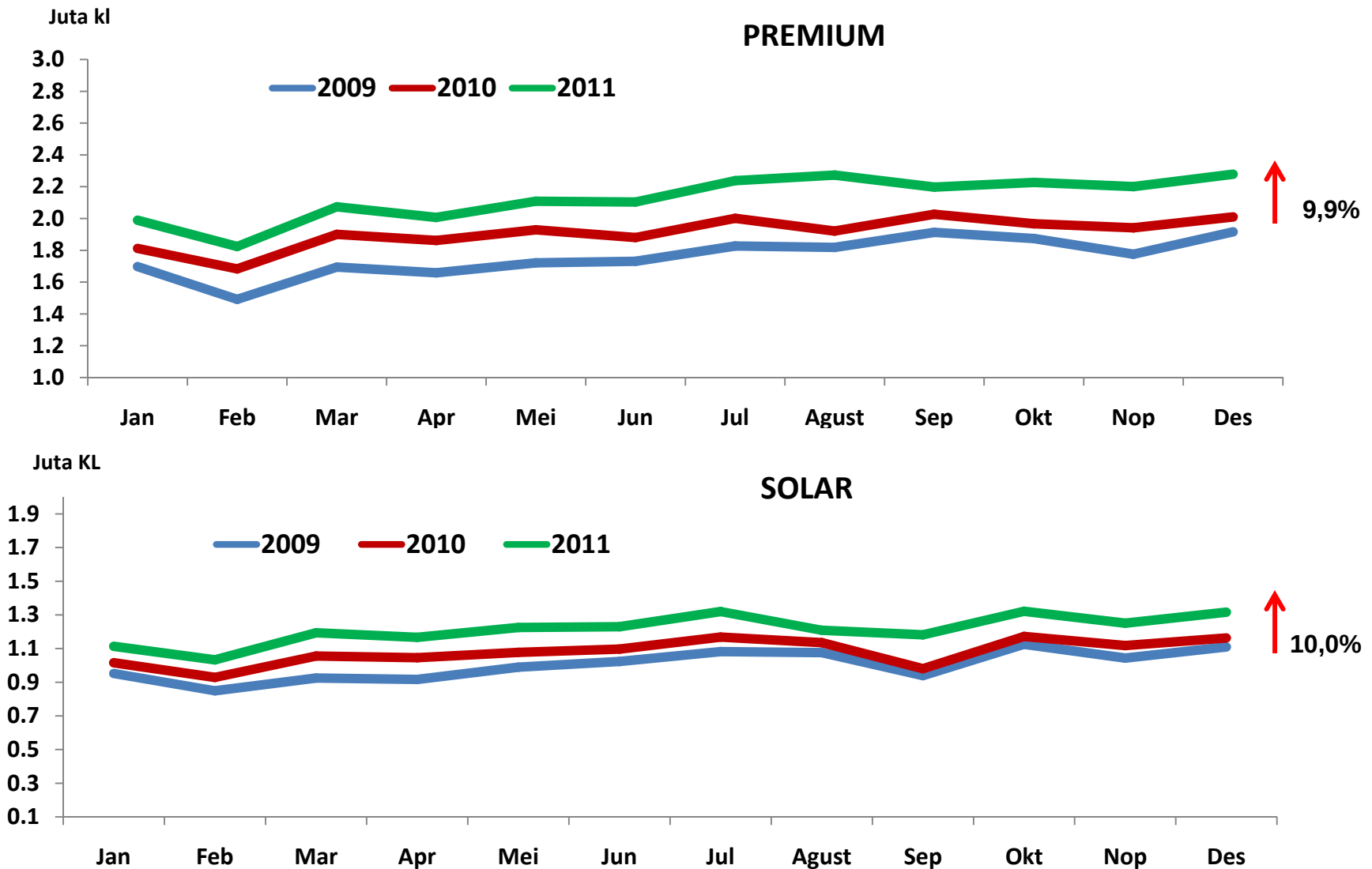
Tanpa kebijakan pengendalian, subsidi BBM akan terus memicu ketidakpastian fiskal....



Tanpa ada kebijakan, subsidi BBM tahun 2012 diperkirakan semakin meningkat dengan tingkat konsumsi BBM bersubsidi sulit dikendalikan.

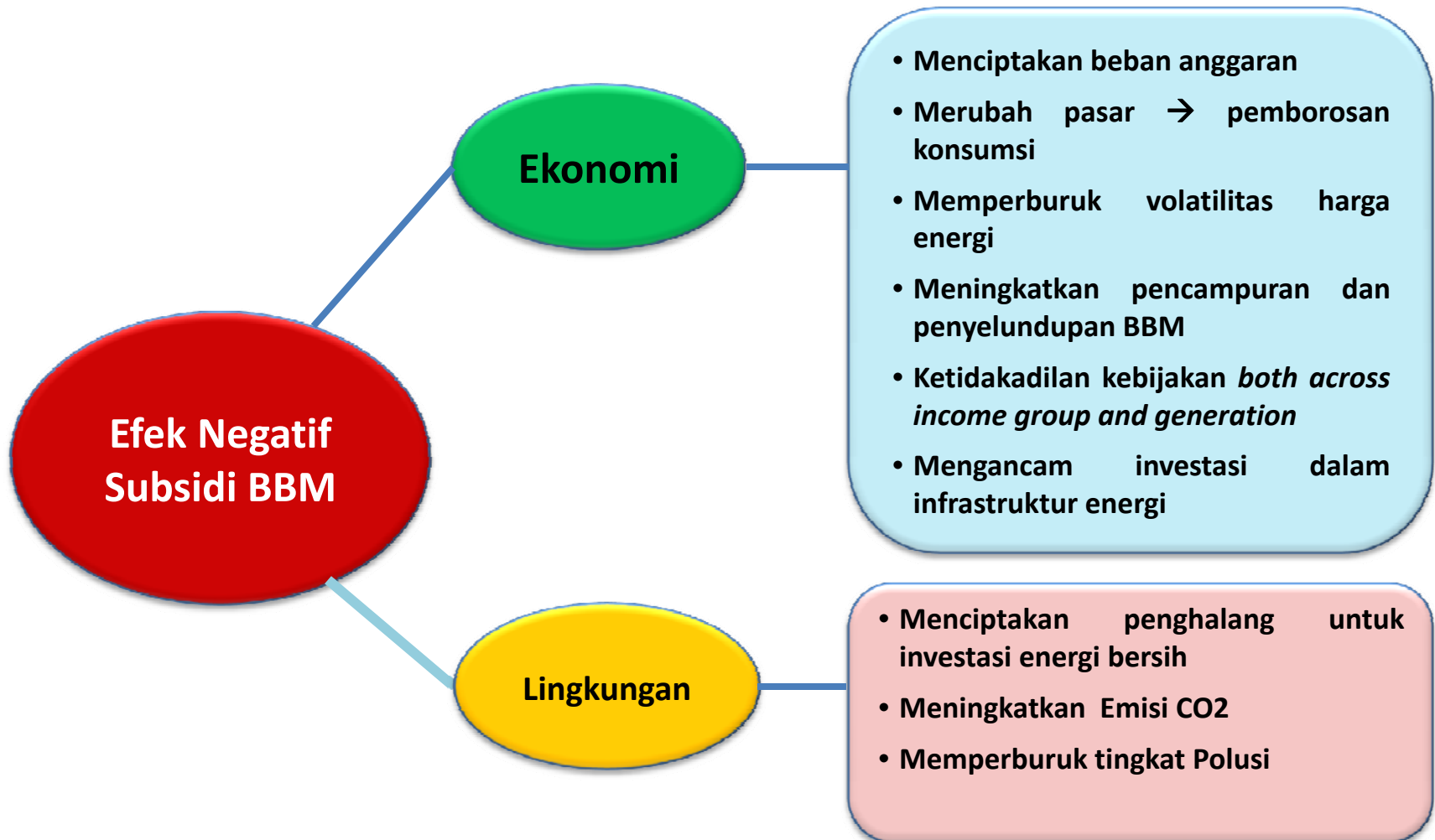


Apabila tanpa kebijakan realisasi konsumsi premium dan solar meningkat sekitar 10%



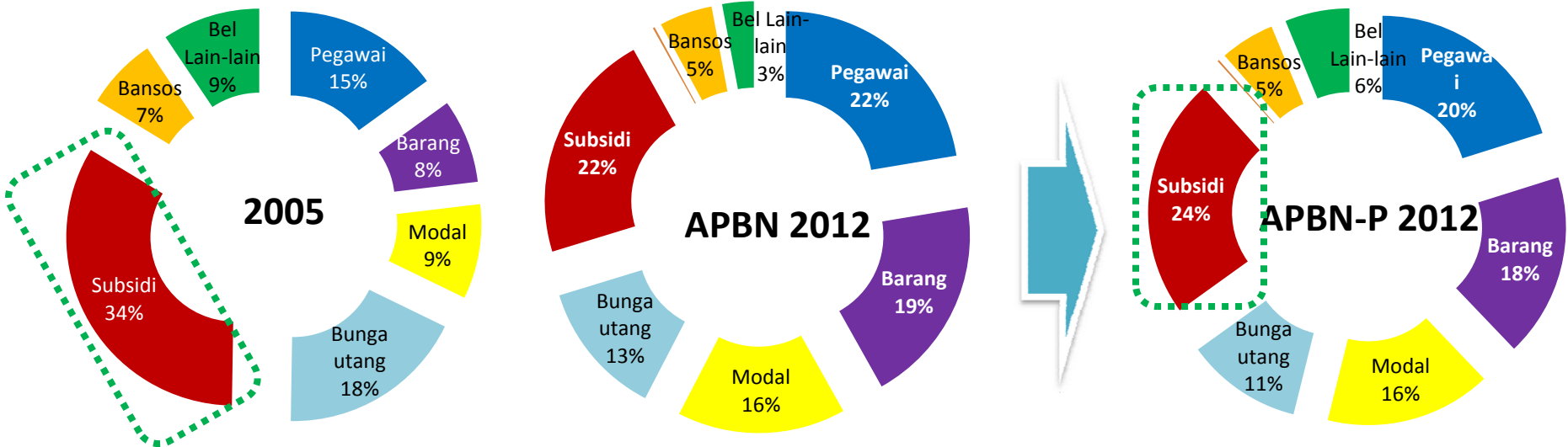


Efek negatif subsidi BBM

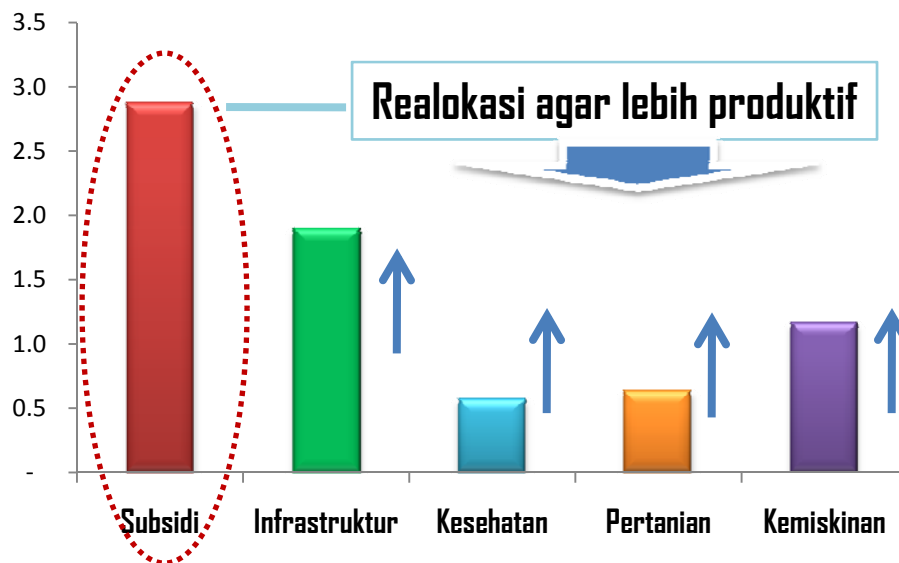




Porsi subsidi khususnya energi masih cukup besar sehingga memicu disparitas harga BBM sehingga berpotensi meningkatkan volume konsumsi BBM....



% PDB



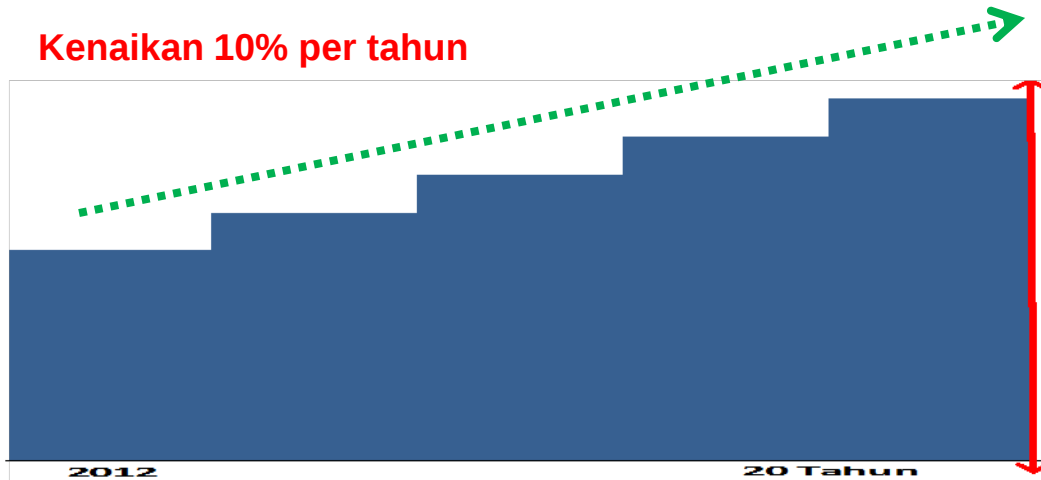
Porsi subsidi masih dominan sehingga mengurangi diskresi pemerintah dalam melakukan ekspansi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya



Peningkatan volume BBM bersubsidi, berisiko cadangan minyak cepat habis

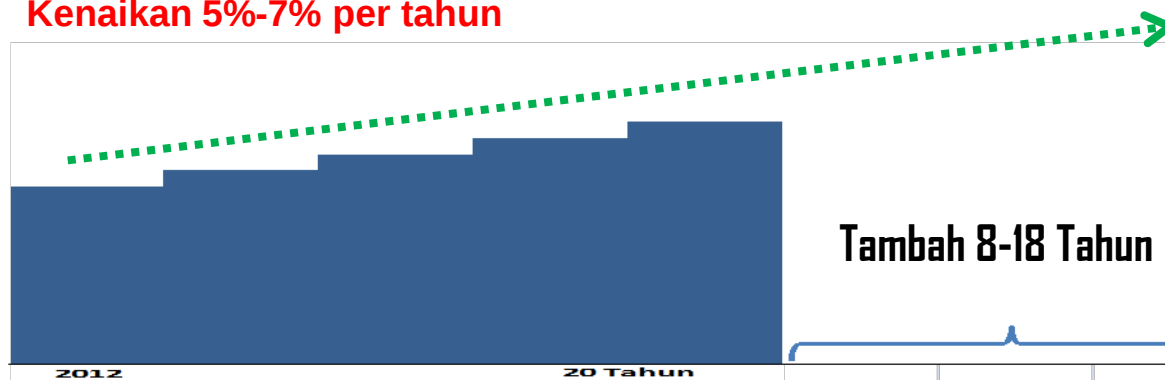


Kenaikan 10% per tahun



Tanpa Kebijakan → Konsumsi BBM Bersubsidi rata-rata meningkat 10% per tahun sehingga diperkirakan cadangan minyak akan habis dalam 20 tahun

Kenaikan 5%-7% per tahun



Dengan Kebijakan → pola konsumsi BBM Bersubsidi lebih terkendali, sehingga peningkatan volume pada kisaran 5% – 7 % per tahun sehingga minyak dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama menjadi 28 -38 tahun



Arah Kebijakan Fiskal Mendukung Ketahanan Energi



Konsep Kebijakan Fiskal Untuk Ketahanan Energi



Fiscal Policy

Revenue side

PPH

PPN

Bea Masuk

Spending side

Infrastruktur
Energi

Pengembangan
Energi baru
terbarukan &
Konservasi
Energi

Penyediaan dan
Distribusi Energi

Financing side

Dana Bergulir
Gheothermal

Penjaminan PLN
(10.000 MW)

**Ketahanan
Energi**





“ Kebijakan Energi Nasional bertujuan untuk menghemat bahan bakar minyak bumi dan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif lainnya.”

Dukungan kebijakan fiskal diberikan pada:

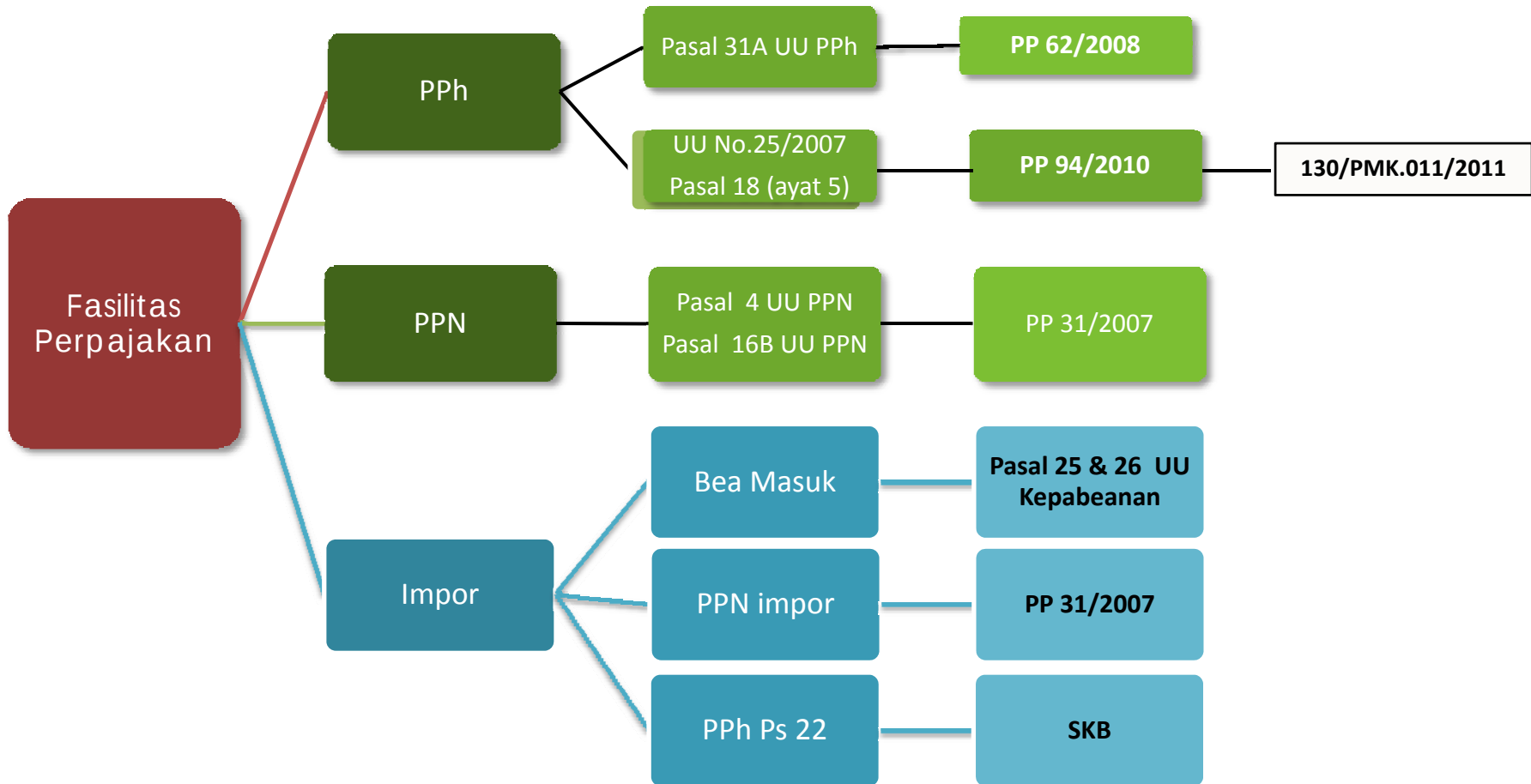
- 1. Pembebasan atau pengurangan PPN, PPh dan Bea Masuk;**
- 2. Pemberian insentif pajak (DTP);**
- 3. Dukung pembangunan infrastruktur Energi, pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, menjaga ketersediaan serta distribusi energi;**
- 4. Pemberian Investasi Pemerintah dan dana bergulir untuk pengembangan energi panas bumi dan jaminan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW**



Insentif Perpajakan untuk Ketahanan Energi



Fasilitas Perpajakan untuk Ketahanan Energi





Fasilitas pada PPh



PP NOMOR 62 TAHUN 2008 PASAL 2

Diberikan kepada WP badan DN (PT-koperasi) yang melakukan penanaman modal pada:

- a. bidang-bidang usaha tertentu; atau
- b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Lampiran: **penambangan dan pemanfaatan batubara mutu rendah, pengusahaan tenaga panas bumi, pembangunan kilang minyak gas bumi dan pembangunan kilang mini gas bumi termasuk kategori yang diberikan *fasilitas pajak penghasilan*.**

1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (selama 6 thn);
2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
3. pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SPLN sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku; dan
4. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 thn tetapi tidak lebih dari 10 thn.

PP NOMOR 94 TAHUN 2010

Fasilitas perpajakan (TAX HOLIDAY) bagi *industri sumberdaya terbarukan dan industri pengolahan yang bersumber dari minyak dan gas bumi* berupa:

1. Pembebasan pajak 5 s.d 10 tahun sejak produksi komersial;
2. Pengurangan pajak sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 thn.

Pelaksanaan PP tersebut diatur dalam PMK No.130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.



PP NOMOR 31 TAHUN 2007

Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Pasal 1 huruf (a)

(1) Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah:

- a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.



Fasilitas pada Bea Masuk



UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 PASAL 26

Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:

- barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan UU tersebut diatur dalam PMK No.176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang, dan Bahan yang Dilakukan dalam Rangka Penanaman Modal , dengan kriteria barang sebagai berikut:

Belum dapat diproduksi di dalam negeri;

Sudah diproduksi di DN namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

Sudah diproduksi di DN namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.



Insentif dalam APBN



Miliar Rp

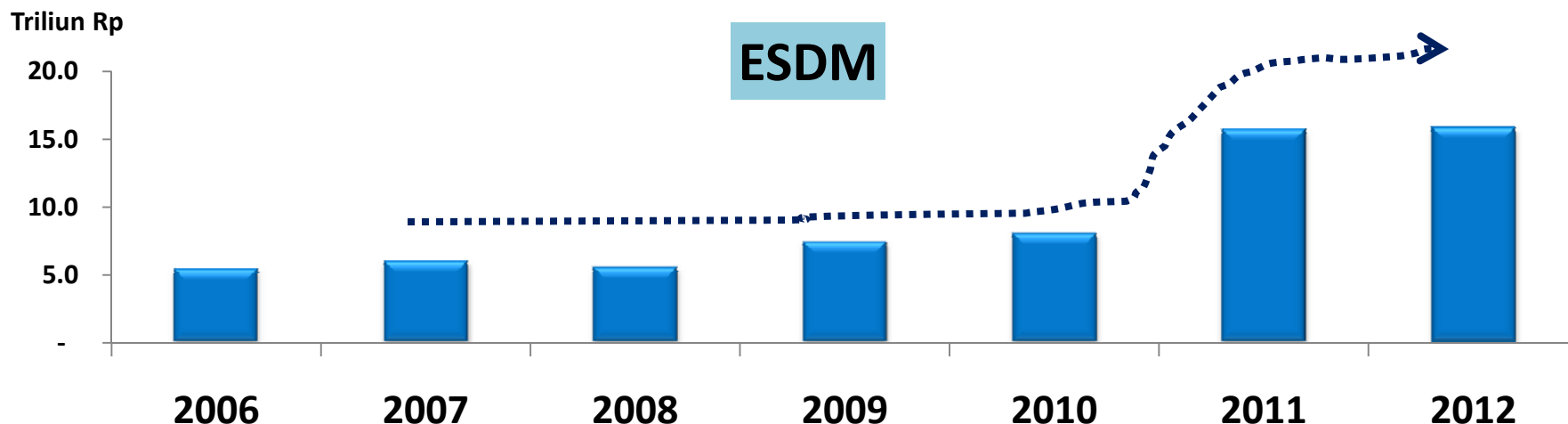
Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pajak Penghasilan (PPh)	500	800	724	1,000	815
a. PPh atas komoditas panas bumi	500	800	624	1,000	815
b. PPh Bahan Bakar Nabati (BBN)	-	-	100	-	-
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16,800	5,700	8,398	-	-
a. PPN atas BBM, BBN, dan LPG 3 kg bersubsidi	9,000	3,000	5,898	-	-
b. PDRI (PPN) eksplorasi migas	7,800	2,500	2,500	-	-
c. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	-	200		-	-
3. Bea Masuk (diluar PMK176/2009)	2,000	2,500	2,000	500	600
Total DTP	19,300	9,000	11,122	1,500	1,415



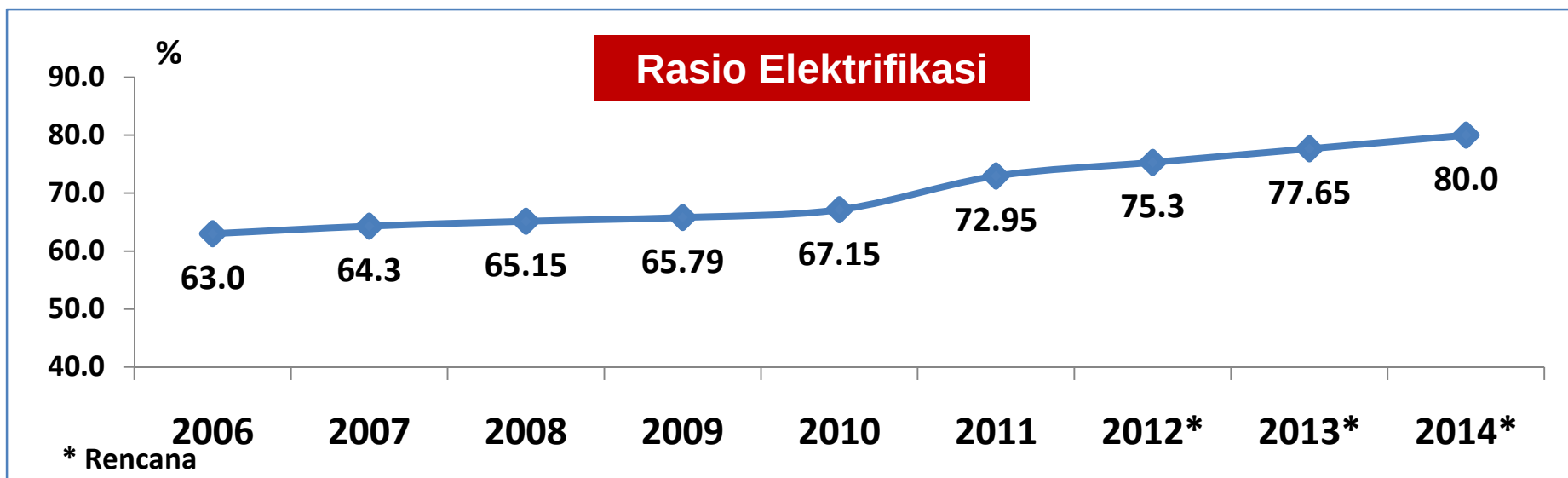
Dukungan Belanja untuk Ketahanan Energi



Dukungan pembangunan infrastruktur energi semakin meningkat seiring dengan peningkatan ratio elektrifikasi ...



Dana Risiko Energi → Rp23 T (APBN-P 2012)





- Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi;
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
- Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
- Program Penelitian , Mitigasi dan Pelayanan Geologi;
- Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi;
- Program Pengelolaan Energi baru Terbarikan dan Konservasi Energi.



Dukungan Pembiayaan untuk Ketahanan Energi



Rp Triliun

	2011	2012
Investasi Pemerintah untuk Gheothermal	1.1	
Dana Bergulir Gheothermal		0.88
Penjaminan PLN	0.89	0.62

1. **Pada Tahun 2011 : Investasi Pemerintah untuk geothermal** untuk mendukung pengembangan energi panas bumi;
2. Pada Tahun 2012: **Dana Bergulir** untuk pengembangan Gheothermal;
3. **Penjaminan kepada PLN** untuk mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.



TERIMA KASIH